



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Gedung Djuanda I Lt. 8-10  
Jalan Dr. Wahidin No. 1  
Jakarta 10710  
Kotak Pos 21

Telepon : 344-9230 (20 saluran),  
Pes. 6291, 385-2160  
Faksimile : 3852146  
Website : [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)

Nomor : S- 1404/SJ/2009  
Sifat : **Segera**  
Lampiran : 1 (satu berkas)  
Hal : Permintaan Pengisian Data Ketenagakerjaan Sektor Keuangan

7 Oktober 2009

**Yth. Pimpinan Perusahaan Sektor Keuangan  
di Tempat**

Dalam rangka pendataan ketenagakerjaan sektor keuangan, guna penyusunan Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN) serta perumusan kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 7 dan 8 menyatakan bahwa Pemerintah termasuk departemen wajib menyusun Rencana Tenaga Kerja Sektoral (RTKS) sebagai acuan untuk menyusun kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan sektoral. RTKS tersebut selanjutnya sebagai bahan untuk membuat Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN).
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, sumber informasi ketenagakerjaan adalah kementerian negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen ditingkat pusat, instansi vertikal, instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh
3. Keterkaitan Departemen Keuangan dalam pembuatan RTKN ini adalah dalam pembuatan Rencana Tenaga Kerja Sektoral (RTKS) dimana Departemen Keuangan mempunyai peran dalam bidang ketenagakerjaan sektor keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam kaitannya dengan RTKS ini, Departemen Keuangan ditunjuk sebagai Pembina Informasi Ketenagakerjaan Sektor Keuangan dalam rangka Penyusunan RTKS dan Kebijakan Penciptaan Kesempatan Kerja.

4. Menindaklanjuti hal tersebut, kami mengharapkan kerjasama perusahaan yang bergerak di bidang sektor keuangan untuk dapat mengisi data ketenagakerjaan terlampir. Data dimaksud kiranya dapat kami terima **sebelum tanggal 30 November 2009**.
5. Data ketenagakerjaan yang telah diisi dapat berbentuk hardcopy atau softcopy dikirim kepada:

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
u.p. Kepala Bagian Perencanaan Program  
Gedung Djuanda I Lantai 10  
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat  
Telepon: 021-3852160  
Email: [perencanaan@depkeu.go.id](mailto:perencanaan@depkeu.go.id) dan [perencanaan@gmail.com](mailto:perencanaan@gmail.com)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. **Sekretaris Jenderal,  
Kepala Biro Perencanaan  
dan Keuangan**



**Abdul Kadir S.  
NIP 060042228**

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
2. Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan.

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Untuk melihat produktivitas kerja diperlukan berbagai informasi seperti standar kompetensi kerja, pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Kriteria apa yang diperlukan pekerja untuk memenuhi standar kompetensi ?  
Mohon penjelasan bagaimana kompetensi, pendidikan dan pelatihan mempengaruhi produktivitas pekerja yang selanjutnya berpengaruh pada jenjang karir pekerja.
2. Kebijakan-kebijakan apa yang diambil untuk perencanaan SDM ?
3. Berapakah perkiraan jumlah pekerja perusahaan untuk tahun 2010 ?
4. Untuk mengisi lowongan kerja, persyaratan apa yang diperlukan ?  
Persyaratan apa yang sangat menentukan seseorang ditempatkan untuk mengisi lowongan tersebut ?
5. Dalam hal hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja :
  - a. Apakah perusahaan mempunyai Serikat Pekerja ?
  - b. Apakah tingkat upah/UMR di perusahaan sudah memenuhi peraturan Pemerintah ?
  - c. Apakah perusahaan sudah mengantisipasi permasalahan tenaga kerja seperti perselisihan hubungan industrial, pemogokan, jaminan sosial, PHK, kecelakaan, keselamatan, kesehatan dsb ?  
Siapa yang menanganinya? (misalnya Badan atau Bagian tertentu di perusahaan).
6. Apakah ada anak perusahaan ?  
Berapa dan bagaimana kondisinya, serta berapa jumlah pekerja dan nama perusahaannya ?
7. Kebijakan-kebijakan apa yang diambil untuk mengantisipasi globalisasi seperti sekarang ini, baik kebijakan umum maupun kebijakan khusus untuk ketenagakerjaan ?
8. Dalam hal peningkatan layanan publik, usaha-usaha apa yang telah dan akan dilakukan perusahaan ?
9. Bagaimana perkembangan kondisi Perusahaan dari tahun 2008-2009 dari segi kinerja umum perusahaan, SDM, prospek usaha, serta keuangan ?
10. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan ?
11. Apakah saran-saran untuk dapat meningkatkan kesempatan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung ?